

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Pasal 16 Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terkait Tarif Retribusi Sampah tidak terlaksana di Polehan, karena ketentuan tarif retribusi sampah tersebut dilakukan berdasarkan swadaya masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi tentang aturan tersebut sehingga petugas pengambil sampah ataupun masyarakat di Polehan tidak mengerti adanya aturan mengenai ketetapan tarif retribusi sampah tersebut.
2. Besaran tarif retribusi sampah di Polehan tidak ditentukan sesuai dengan Pasal 16 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terkait Tarif Retribusi Sampah yang telah diatur di dalam Lampiran II Perda tersebut. Penetapan besaran tarif retribusi sampah di Polehan ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat di wilayah mereka masing-masing dimana hal tersebut disesuaikan pula dengan kemampuan dari masyarakat itu sendiri.
3. Aturan tersebut tidak mengikat bagi masyarakat di Polehan, baik dari segi penentuan tarif retribusi, pengawasan pelaksanaan pembayaran, penarikan retribusi sampai dengan penetapan sanksi bagi pelanggar.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hal tersebut ialah sebagai berikut.

1. Bagi Kelurahan Polehan, penulis memberikan saran sebagai berikut.
 - a. Perlunya diadakan sosialisasi secara menyeluruh tentang peraturan terkait kebersihan di Polehan, terutama apabila ingin melaksanakan ketentuan tarif retribusi persampahan sehingga masyarakat di Polehan mengerti, memahami dan dapat melaksanakan peraturan tersebut.
 - b. Perlunya pengawasan rutin terkait pelaksanaan tugas lembaga Seksi Kebersihan dan Lingkungan dari RW untuk meningkatkan kebersihan lingkungan secara rutin, sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan ketika pelaksanaan lomba kebersihan saja tetapi juga rutin dilakukan setiap bulan.
2. Bagi masyarakat Polehan, penulis memberikan saran yakni perlunya diadakan sosialisasi dari ketua wilayah baik RW/RT dalam forum perkumpulan yang rutin dilaksanakan kepada masyarakat Polehan. Berkaitan mengenai perlunya pelaksanaan, tujuan, fungsi serta manfaat pelaksanaan suatu peraturan agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, ed. 2, Salemba Humanika, Jakarta, 2012.
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- G., Gunawan, *Mengolah Sampah Jadi Uang*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2007.
- Hasan, Elinan, *Komunikasi Pemerintahan*, Rafika Aditama, Jakarta, 2005.
- Makara, Mohammad Taufik, *Akses-Akses Hukum Lingkungan*, Ikrar Mandiriabadi, Bekasi, 2006.
- Nalle, Victor Imanuel W., *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. 1, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.
- Putra, Fadillah, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta 2001.
- Wasistiono, Sadu, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003.
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.

ARTIKEL:

ARTIKEL DALAM JURNAL:

- Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius, :“Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Universitas Pepabari Makassar, Vol. 1, 2008, https://www.academia.edu/10240826/ARTIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya?auto=download.
- Hertomo, Eko Yulianto Widhi, et. al, : “Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi”,

Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor, Vol. 10 Nomor Khusus, 2018, <http://dx.doi.org/10.29244/jurnal%20mpd.v10i-.22712>.

Kamalludin, : “Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kotamadya Daerah TK II Malang No. 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang)”, *Jurnal Reformasi*, Universitas Al Amin Sorong, No. 3, 2013.

ARTIKEL DALAM SKRIPSI/TESIS:

G., Rizal Yustisia., : "*Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)*", Skripsi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2014, hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/805.

Subchan, Abd. Khaliq, : "*Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2011 Sampai 2015*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016, [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4831/1/Abd%20Khaliq %20Subchan.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4831/1/Abd%20Khaliq%20Subchan.pdf).

Widiastuti, Aan, : "*Implementasi Kebijakan Program Desa Maslahat Di Kabupaten Pasuruan (Studi Desa Kalirejo Kecamatan Bangil)*", Tesis Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Muhammadiyah Malang, 2017, <http://eprints.umm.ac.id/35898/>.

INTERNET:

<https://kbbi.web.id/implementasi>, 14 Maret 2019.

<https://kelpolehan.malangkota.go.id/>, 18 Juni 2019.

<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/>, 18 Juni 2019.

AM Moyong, 2014, <http://digilib.unila.ac.id/2310/8/BAB%20II.pdf>, 21 Maret 2019.

Satria, Ase, : *“Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan”*, 2015, <https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html#>, 16 Maret 2019.

“Model Implementasi kebijakan George Edward III,” 2009, <http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>, 16 Maret 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

